

TINGKAT KESEJAHTERAAN PETANI KABUPATEN JOMBANG: PENDEKATAN NILAI TUKAR PETANI

Rosihan Asmara^{1*}, Nuhfil Hanani¹

¹Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya

PENDAHULUAN

Kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan GDP pada tahun 2014 menempati peringkat 3 setelah sektor industri manufaktur dan perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia masih relatif besar. Keberhasilan proses transformasi ekonomi menyebabkan pertumbuhan di banyak sektor di luar pertanian lebih tinggi dibanding sektor pertanian sehingga kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan GDP mengalami penurunan.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian menyerap 34% dari jumlah angkatan kerja atau sebesar 38.973.033 orang. Sedangkan sektor industri manufaktur dan perdagangan yang memiliki kontribusi besar dalam pembentukan GDP masing-masing hanya menyerap 13,31% dan 21,66% (BPS, 2014). Hasil Sensus Pertanian, 2013 mencatat bahwa rumah tangga yang mengandalkan pertanian sebagai sumber pendapatannya masih 26.126.200 rumah tangga atau sekitar 42,7% dari total rumah tangga di Indonesia. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sektor pertanian masih sangat dominan dalam jumlah serapan tenaga kerja Indonesia. Kegiatan sektor pertanian sebagian besar dilakukan di wilayah pedesaan dan didominasi dengan kegiatan usahatani budidaya (*on farm*) oleh petani penggarap dan buruh tani.

Pembangunan pertanian yang dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program seperti peningkatan produksi pertanian, stabilisasi pasokan dan harga bahan pangan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kebijakan-kebijakan dalam rangka pembangunan pertanian yang selama ini dilaksanakan diyakini telah berhasil meningkatkan produksi hasil pertanian, peningkatan perekonomian pedesaan serta pemenuhan kebutuhan konsumen pedesaan dan perkotaan. Namun keberhasilan ini, masih menyisakan permasalahan tentang kemiskinan yang belum sepenuhnya terpecahkan, terutama kemiskinan di pedesaan. Kajian yang dilakukan oleh Dillon, *et al.*, 1999 dan Simatupang, *et al.*, 2000 menyatakan bahwa peningkatan produksi pertanian melalui berbagai rekayasa teknologi dan kelembagaan dinilai belum mampu meningkatkan pendapatan, kesejahteraan petani dan penanggulangan kemiskinan di wilayah pedesaan. Kondisi ini masih belum banyak berubah, data menunjukkan bahwa meskipun secara keseluruhan jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan dari 29,13 juta jiwa di tahun 2012 menjadi 28,28 juta jiwa di tahun 2014, namun proporsi kemiskinan di pedesaan masih relatif besar. Dari keseluruhan penduduk miskin Indonesia, 17,77 juta berada di pedesaan (63%) sementara penduduk miskin di perkotaan hanya 37% atau sekitar 10.51 juta jiwa (BPS, 2015).

Dampak pembangunan pertanian yang dilaksanakan terhadap kesejahteraan petani sangat relevan untuk dilakukan pengkajian. Pengkajian tersebut terutama diarahkan untuk menilai kebijakan yang memberi dampak positif, negatif atau netral terhadap kesejahteraan petani. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan petani adalah indeks Nilai Tukar Petani (NTP). NTP merupakan ukuran kemampuan daya tukar

hasil pertanian terhadap barang yang dibeli oleh petani. Peningkatan nilai tukar petani mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan petani karena adanya peningkatan kemampuan riil petani. Semakin tinggi NTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani (Silitonga, 1995; Sumodiningrat, 2001; Tambunan, 2003 dan Masyhuri, 2007). Pengetahuan secara detail terhadap perilaku nilai tukar petani termasuk faktor-faktor yang menentukan nilai tukar petani akan sangat berguna bagi perencanaan kebijakan pembangunan pertanian di masa yang akan datang. Oleh karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesejahteraan petani di Kabupaten Jombang menggunakan instrument Nilai Tukar Petani.

METODE PENELITIAN

Perhitungan NTP menggunakan indeks Laspeyres modifikasi seperti dalam persamaan berikut:

$$NTP = \frac{IT_n}{IB_n}$$

Keterangan :

- NTP = Nilai Tukar Petani
 IT_n = Indeks yang diterima petani tahun ke-n
 IB_n = Indeks yang dibayar petani tahun ke-n

Sedangkan penghitungan IT_n dan IB_n berdasarkan Indeks *Modified Laspeyres* sebagai berikut:

$$IT_n = \frac{\sum_{i=1}^m \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} P_{(n-1)i} * Q_{0i}}{\sum_{i=1}^m P_{0i} * Q_{0i}} \times 100$$

$$IB_n = \frac{\sum_{i=1}^m \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} P_{(n-1)i} * Q_{0i}}{\sum_{i=1}^m P_{0i} * Q_{0i}} \times 100$$

Dimana:

- IT_n : Indeks Terima Petani tahun ke-n
 IB_n : Indeks Dibayarkan Petani tahun ke-n
 P_{ni} : Harga komoditi/barang i pada tahun ke-n (Rp/unit)
 $P_{(n-1)i}$: Harga komoditi/barang i pada tahun sebelumnya (n-1) (Rp/unit)
 Q_{0i} : Kuantitas komoditi/barang i pada tahun dasar (unit)
 P_{0i} : Harga komoditi/barang i pada tahun dasar (Rp/unit)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan komponen pembentuk NTP, indeks harga yang diterima petani merupakan nilai yang diterima petani dari hasil produksi berbagai komoditas pertanian. Indeks harga yang diterima petani berdasarkan komoditas yang dihasilkan dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok menurut subsektor pertanian yaitu: subsektor tanaman pangan, subsektor hortikultura, subsektor perkebunan, subsektor perikanan, dan

subsektor peternakan. Indeks harga yang diterima petani kabupaten Jombang menurut subsektor pertanian disajikan secara lengkap pada Tabel 1.

Tabel 1. Indeks Harga yang Diterima Petani Kabupaten Jombang Menurut Subsektor Pertanian Tahun 2013 – 2015 (2012 = 100)

Subsektor	Tahun		
	2013	2014	2015
Tanaman Pangan	111,83	116,14	131,67
Hortikultura	101,91	118,84	122,80
Perkebunan	104,21	115,06	116,33
Perikanan	112,44	120,74	128,47
Peternakan	108,55	114,22	122,50
Rata-rata IT	109,42	117,78	125,49

Sumber : Data Primer, 2015 (diolah)

Rata-rata indeks harga yang diterima petani pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 13,32 % dari 117,78 menjadi 125,49. Kenaikan indeks ini disebabkan oleh naiknya indeks harga yang diterima petani pada semua sub sektor, khususnya subsektor tanaman pangan naik 13,37% dari 116,14 menjadi 131,67. Selain subsektor tanaman pangan, perikanan dan peternakan mengalami peningkatan yang relatif besar berturut-turut sebesar 6,40% dan 7,24%. Secara rinci laju pertumbuhan indeks harga yang diterima petani di kabupaten Jombang berdasarkan subsektor pertanian disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Yang Diterima Petani Kabupaten Jombang Menurut Subsektor Pertanian Tahun 2013 – 2015 (2012 = 100)

Subsektor Pertanian	Periode	
	2013– 2014 (%)	2014 – 2015 (%)
Tanaman Pangan	3,86	13,37
Hortikultura	16,62	3,33
Perkebunan	10,42	1,10
Perikanan	7,38	6,40
Peternakan	5,23	7,24

Sumber : Data Primer, 2015 (diolah)

Harga yang dibayar petani merupakan harga tertimbang dari harga/biaya konsumsi makanan, konsumsi non makanan dan biaya produksi dan penambahan barang modal dari barang yang dikonsumsi atau dibeli petani. Komoditas yang dihasilkan sendiri tidak masuk dalam perhitungan harga yang dibayar petani. Harga yang dimaksud adalah harga eceran barang dan jasa yang berada di pasar pedesaan. Indeks yang dibayar petani terbesar pada tahun 2015 terdapat pada komponen pengeluaran untuk konsumsi makanan dan minuman sebesar 133,78. Sedangkan Indeks terkecil terdapat pada komponen pengeluaran biaya produksi dan penambahan barang modal pada tahun 2013 sebesar 102,83. Rata-rata indeks harga yang bayar petani Kabupaten Jombang ditunjukkan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Indeks Harga Yang Dibayar Petani Kabupaten Jombang Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2013 – 2015 (2012 = 100)

Komponen Pengeluaran	Tahun		
	2013	2014	2015
Konsumsi Makanan Minuman	114,61	125,83	133,78
Konsumsi Non-Makanan Minuman	106,19	113,45	121,82
Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal	102,83	106,72	113,44

Sumber : Data Primer, 2015 (diolah)

Selama periode 2014 - 2015 indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) secara umum mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 6,3% persen. Sedangkan periode 2013 – 2014 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 3,78%. Indeks Biaya Konsumsi Non-Makanan dan Minuman juga mengalami kenaikan rata-rata sebesar 7,38% pada periode 2014-2015 dan 6,84% pada periode 2013-2014. Kenaikan terbesar terjadi pada konsumsi makanan dan minuman pada periode 2013-2014 sebesar 9,79%. Sedangkan pada periode 2014-2015 kenaikan indeks konsumsi makanan dan minuman sebesar 6,32%. Secara rinci laju kenaikan indeks harga yang dibayar petani pada periode 2013 -2015 disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Yang Dibayar Petani Kabupaten Jombang Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2013 – 2015 (2012 = 100)

Komponen Pengeluaran	Periode	
	2013–2014 (%)	2014 –2015 (%)
Konsumsi Makanan Minuman	9,79	6,32
Konsumsi Non-Makanan Minuman	6,84	7,38
Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal	3,78	6,30

Sumber : Data Primer, 2015 (diolah)

Nilai tukar petani merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani (IT) dan indeks harga yang dibayar petani (IB). Nilai tukar petani merupakan indikator tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengetahuan secara mendalam tentang perilaku nilai tukar petani dan identifikasi faktor-faktor penentu nilai tukar akan sangat berguna bagi perencanaan kebijakan pembangunan dan perbaikan program-program pembangunan ke depan. Berikut ini nilai NTP Tahun 2013 – 2015 disajikan secara lengkap dalam Tabel 5.

Tabel 5. Nilai Tukar Petani Kabupaten Jombang Tahun 2013 – 2015 (2012 = 100)

Indeks	Tahun		
	2013	2014	2015
IT	109,42	117,78	125,49
IB	98,03	105,06	112,08
NTP	111,62	112,10	111,97

Sumber : Data Primer, 2015 (diolah)

Berdasarkan Tabel 15 dapat diketahui bahwa nilai IT dan IB mengalami peningkatan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Nilai IT selama periode 2013-2014 mengalami peningkatan dari 109,42 menjadi 117,78 dengan laju sebesar 7,64%, sementara untuk periode 2014-2015 nilai IT meningkat dari 117,78 menjadi 125,49 dengan laju sebesar 6,55%. Sedangkan nilai IB selama periode 2013-2014 meningkat dari 98,03 menjadi 105,06 dengan laju sebesar 7,17%, dan pada periode 2014 – 2015 meningkat dari 105,06 menjadi 112,08 dengan laju sebesar 6,68%. Secara rinci, perkembangan laju pertumbuhan Nilai Tukar Petani Kabupaten Jombang disajikan dalam Tabel 6.

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Nilai Tukar Petani Kabupaten Jombang Tahun 2013 – 2015 (2012 = 100)

Indeks	Periode	
	2013 – 2014	2014 - 2015
Indeks yang Diterima Petani	7,64	6,55
Indeks yang Dibayar Petani	7,17	6,68
NTP	0,43	(0,12)

Sumber : Data Primer, 2015 (diolah)

Meskipun nilai IT dan IB terus mengalami peningkatan namun demikian pada kedua periode tersebut, laju pertumbuhan IT lebih kecil bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan IB. Laju peningkatan kedua indeks ini pada tahun 2015 masing-masing adalah sebesar 6,55% dan 6,68%. Ini berarti bahwa peningkatan harga-harga yang diterima petani secara absolut lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan harga-harga yang dibayarkan oleh petani dengan laju peningkatan yang semakin menurun. Kondisi ini mengakibatkan nilai NTP Kabupaten Jombang pada tahun 2015 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dimana nilai NTP pada tahun 2014 adalah sebesar 112,1 sedangkan pada tahun 2015 menjadi 111,97 atau mengalami penurunan sebesar 0,12% dari tahun sebelumnya.

KESIMPULAN

Nilai tukar petani di Kabupaten Jombang tahun 2015 secara umum mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 0,117% yaitu dari 112,1 menjadi 112,0. Penurunan ini disebabkan oleh laju pertumbuhan indeks harga yang diterima petani (IT) lebih rendah daripada laju pertumbuhan indeks harga yang dibayarkan petani (IB). Dimana pada periode tahun tersebut laju pertumbuhan IT sebesar 6,55% sedangkan IB sebesar 6,68%. Laju pertumbuhan IT yang lebih kecil dari laju pertumbuhan IB pada tahun 2015 menunjukkan bahwa kenaikan harga-harga yang diterima petani dari hasil produksinya secara absolut lebih kecil daripada kenaikan harga-harga untuk barang-barang yang dibayarkan oleh petani. Artinya bahwa pengeluaran petani secara proporsional lebih tinggi daripada pendapatannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan petani pada tahun 2015 tidak lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pengukuran NTP sebagai alat ukur kesejahteraan petani memiliki karakteristik yakni pengaruh perubahan harga sangat dominan dibandingkan jumlah barang yang diproduksi (dikonsumsi). Intervensi pemerintah yang berpengaruh terhadap peningkatan produksi pertanian tidak tampak dalam perubahan nilai NTP. Introduksi teknologi budidaya atau

pengolahan pasca panen akan berpengaruh pada nilai NTP jika mengurangi komponen biaya produksi atau memperbaiki kualitas produksi sehingga harga produk menjadi lebih tinggi. Sementara itu, kebijakan-kebijakan nasional yang berpengaruh terhadap inflasi akan memiliki dampak yang lebih besar terhadap perubahan NTP.

Kontribusi harga pangan dalam pembentukan NTP sangat besar baik pada pembentukan harga yang diterima petani maupun harga yang dibayar oleh petani. Peningkatan harga komoditas tanaman pangan ditingkat petani (produsen) akan berdampak langsung pada peningkatan harga konsumsi pangan maupun secara tidak langsung terhadap konsumsi non pangan. Peningkatan harga-harga di tingkat produsen, khususnya tanaman pangan akan berdampak pada pengeluaran konsumsi rumah tangga petani sehingga tujuan awal kebijakan untuk meningkatkan NTP petani pada akhirnya akan diikuti oleh peningkatan harga yang dibayarkan oleh petani sehingga memungkinkan terjadinya penurunan NTP. Oleh karena itu, perbaikan penerimaan petani melalui kebijakan peningkatan harga produsen harus diimbangi dengan kebijakan pengendalian harga di tingkat konsumen.

Peningkatan NTP berarti proporsilaju kenaikan harga yang diterima petani lebih tinggi daripada laju kenaikan harga yang dibayar petani. Pada kondisi demikian maka NTP yang konstan dinilai lebih memadai, karena pada NTP yang konstan berarti perubahan harga yang diterima petani meningkat (atau menurun) secara proporsional dengan perubahan harga yang dibayar petani. Oleh karena itu kebijakan mempertahankan laju peningkatan NTP secara proporsional lebih penting daripada meningkatkan nilai NTP tahunan itu sendiri.

REFERENSI

- Bank Dunia. 2011. Perkembangan. Pemicu dan Dampak Harga Komoditas: Implikasinya terhadap perekonomian Indonesia. Laporan Pengembangan Sektor Perdagangan..
- BPS. 2015. Statistik Nilai Tukar Petani Jawa Timur. BPS. Surabaya.
- Diakosavas. D. and P.L. Scandizzo. 1991. Trends In The Terms Of Trade And Cost Structure As An Analytical Tool For Estimating The Food Crops Farmers Welfare. Jakarta
- Pramonodidhi. D. 1984. Tingkah Laju Nilai Tukar Komoditas Pertanian pada Tingkat Petani. Laporan Penelitian. Kerjasama Pusat Penelitian Agro Ekonomi Dengan Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
- Rachmat. M., Supriyati, Deri Hidayat dan Jefferson Situmorang. 2000. Perumusan Kebijakan Nilai Tukar Petani dan Komoditas Pertanian. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Departemen Pertanian Bogor.
- Rachmat. Muchjidin. 2000. Analisa Nilai Tukar Petani Indonesia. Disertasi. Institute Pertanian Bogor.
- Silitonga C. 1995. Diagnosa Metoda dan Penafsiran Angka Nilai Tukar Petani dalam Pangan 6 (23). BULOG. Jakarta: 23-39.
- Simatupang. P. 1992. Pertumbuhan Ekonomi dan Nilai Tukar Barter Sektor Pertanian. Jurnal Agroekonomi: 11(1): 33-48.
- Simatupang. P. dan B. Isdijoso. 1992. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Nilai Tukar Sektor Pertanian. Landasan Teoritis dan Bukti Empiris. Ekonomi dan Keuangan Indonesia 40 (1): 33-48.